

# Restrukturisasi Departemen Kelautan dan Perikanan

Oleh THOMAS NUGROHO

**KEBERADAAN** Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang pada awal kemunculannya bernama Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) telah memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia terutama dalam pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan. DKP ini muncul dari sebuah gagasan besar mengenai pentingnya memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. Karena harus diakui bahwa potensi sumberdaya kelautan dan perikanan selama sejarah pembangunan bangsa Indonesia pasca-kemerdekaan kurang mendapat perhatian serius.

Namun sayangnya kemunculan DKP tidak melalui proses kajian publik yang mendalam. Kehadiran DKP dalam struktur pemerintahan hanya karena adanya faktor keputusan politik sejak pemerintahan Gus Dur, sehingga keberadaan

dan kinerja departemen tersebut hingga saat ini kurang efektif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya terutama dalam bidang kelautan yang memiliki aspek pembangunan yang sangat luas. DKP memikul beban tugas yang terlalu besar dalam menangani bidang kelautan. Mengingat bidang kelautan mempunyai dimensi yang amat luas dan lintas sektoral meliputi pertahanan, perhubungan, pertambangan dan energi, pariwisata, industri, perdagangan, keuangan, lingkungan hidup, pemukiman serta perikanan.

Amatlah tidak mungkin DKP sebagai lembaga pemerintahan yang relatif baru ini mampu mengurus bidang kelautan yang selama ini secara parsial telah diurus oleh beberapa lembaga pemerintahan lainnya seperti departemen dalam negeri, luar negeri, pertahanan, kehakiman, perhubungan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, indus-

tri, perdagangan, keuangan, lingkungan hidup serta pemukiman prasarana wilayah. Sehingga bisa dipahami bila selama ini DKP secara riil hanyalah efektif menjalankan tugas dan fungsinya mengurus sektor perikanan. Sementara fungsi dan tugas di bidang kelautan tidak efektif dijalankan karena harus berhadapan dengan beberapa lembaga pemerintahan lainnya yang sudah lebih lama mengurus bidang kelautan.

Contoh tugas DKP yang tidak efektif dijalankan adalah soal pengawasan dan penangan penambangan pasir laut ilegal serta *illegal fishing* oleh kapal ikan asing. DKP tidak efektif menjalankan tugas tersebut karena harus bersentuhan dengan tugas Deptamben dan TNI AL yang pada masa lalu menanganinya.

Meskipun telah dibentuk tim pengawas penambangan pasir laut (P4L) melalui keppres di mana Menteri Kelautan dan

Perikanan (MenKP) sebagai koordinator, namun dalam pelaksanaannya tidak mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan. Ada beberapa kasus pelanggaran penambangan pasir laut yang ditangani tetapi belumlah ada yang sampai ke pengadilan.

Dari struktur kelembagaan yang tertuang dalam KepMenKP No. Kep 01/Men/2001, memperjelas bahwa koor kompetensi departemen ini adalah bidang perikanan. Penamaan departemen dengan menggunakan istilah kelautan menimbulkan konsekuensi fungsi dan tugas yang amat luas. Meskipun kelautan dan perikanan merupakan bidang yang penting akan tetapi kedua hal tersebut mempunyai perbedaan terminologi yang sangat mendasar.

Perikanan adalah salah satu unsur bidang kelautan. Jadi memposisikan istilah kelautan dan perikanan menjadi nama departemen adalah kurang tepat. Dengan menyand-

ingkan istilah kelautan dan perikanan menjadi nama departemen telah menimbulkan beban psikologis serta distorsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi departemen. Hal ini dapat dipahami, sebab sejak awal kemunculannya DKP kesulitan dan cenderung tidak fokus dalam merumuskan tugas dan fungsinya serta gamang dalam menentukan visi dan misi terutama di bidang kelautan.

Karena harus bersentuhan dengan departemen lain yang telah lebih dahulu mengurus bidang kelautan menjadikan DKP tidak operasional dalam menjalankan tugasnya mengatasi persoalan-persoalan di bidang kelautan. Untuk menghindari mis-interpretasi dari berbagai pihak terutama pihak legislatif mengenai kinerja DKP selama ini, maka diperlukan segera melakukan restrukturisasi departemen.

Hal ini perlu sebab jangan sampai ada pemikiran yaitu

perlu melakukan likuidasi departemen ini pada pemerintahan baru yang akan datang. Karena selama ini seringkali beredar rumor mengenai perlu peninjauan kembali keberadaan DKP pada kabinet pemerintahan yang akan datang. Mengingat departemen ini tidak menunjukkan kinerja yang meyakinkan yaitu mampu membangkitkan simpul-simpul ekonomi di bidang kelautan dan perikanan, sehingga tidak jelas target pencapaian kontribusi untuk penerimaan negara. Akan tetapi departemen ini cenderung malah membebani anggaran negara. Hal tersebut terlihat dari berbagai program kegiatan yang dilaksanakan oleh DKP selama ini. Program-program yang dilaksanakan tersebut cenderung tidak operasional atau sulit diimplementasikan dan hanya menghasilkan tumpukan-tumpukan kertas.

Ke hal.7, RESTRUKTURISASI

## Restrukturisasi .....

Meskipun ada program konkret seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP) yang konon diidolakan, tetapi program ini pun sarat dengan manipulasi dan KKN sehingga tingkat keberhasilannya disinyalir hanya kurang dari 30 persen.

Namun demikian dari berbagai kelemahan yang dimiliki oleh DKP, bukan berarti masalah kelautan dan perikanan tidak penting. Masalah kelautan dan perikanan sangat penting dan harus menjadi perhatian utama pemerintah sehingga perlu ditangani oleh lembaga negara setingkat departemen.

Namun kelembagaan negara yang saat ini menangani masalah kelautan dan perikanan harus direstrukturisasi. Sebaiknya DKP diubah saja menjadi Departemen Perikanan (Depkan). Sementara kelembagaan negara yang mengurus kelautan harus dibentuk Kementerian Koordinator Kelautan (Menko Kelautan).

Depkan dibentuk agar pemerintah lebih memfokuskan perhatian pada pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap dan budidaya di laut maupun di darat. Struktur Depkan bisa saja sama dengan struktur DKP saat ini tetapi tanpa Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Ditjen P3K) dan Direktorat Jenderal Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) sehingga departemen ini bisa lebih ramping. Sementara keberadaan Ditjen P3K dan PSDKP lebih baik di bawah Menko Kelautan.

Keberadaan Menko Kelautan ini sangat penting mengingat bidang kelautan bukanlah

merupakan sektor tetapi merupakan *multi-sector* yang terdiri dari berbagai sektor ekonomi seperti pertambangan, perhubungan laut, pariwisata, industri dan perikanan dan lain-lain.

Selama ini pembangunan yang memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan tidak dilakukan oleh satu koordinasi lembaga negara tetapi dilakukan secara parsial oleh beberapa lembaga negara setingkat departemen seperti Departemen Pertahanan, Luar Negeri, Perhubungan, Energi, Pariwisata, Industri dan Perdagangan, Keuangan, Lingkungan Hidup serta Kimpraswil.

Sehingga untuk menjadikan kelautan sebagai *leading sector* dalam pembangunan ekonomi, maka pendekatan kebijakan yang dilakukan harus mempertimbangkan keterkaitan antar-sektor ekonomi dalam lingkup bidang kelautan. Dalam hal ini perlu adanya koordinasi dan perencanaan pembangunan yang terpadu dengan melibatkan peran antar-institusi pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang membidangi kelautan. Oleh karenanya keberadaan Menko Kelautan menjadi sangat penting untuk melakukan koordinasi dan perencanaan dalam pembangunan kelautan nasional.

Sudah saatnya Indonesia mempunyai visi baru dalam memandang potensi kelautan nasional. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan 2/3 luas wilayah adalah lautan sudah sepatutnya bangsa Indonesia melakukan reposisi kebijakan pembangunan yaitu dari kebijakan yang terlalu berorientasi pada visi daratan menuju pada kebijakan yang berorientasi pada penguatan visi negara kepulauan yang mengutamakan pembangunan

berbasis kelautan.

Pembentukan Menko Kelautan merupakan langkah awal dan harus menjadi keputusan ekonomi politik masa depan yang akan memberikan harapan terjadinya proses perubahan yang mendasar di tingkat kebijakan ekonomi makro yang memungkinkan bidang kelautan menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

Kebijakan kelautan yang komprehensif dalam memandang laut sebagai pemersatu wilayah, kesatuan politik dan ekonomi perlu diwujudkan dalam konteks kekinian. Mengingat saat ini Indonesia telah kehilangan spirit dan idealisme sebagai bangsa bahari. Kondisi demikian akibat lebih dari tiga dasa warsa kebijakan pembangunan nasional kurang memperhatikan dan tidak memandang kelautan sebagai potensi nasional.

Kurangnya perhatian pemerintah pada bidang kelautan di masa lalu mengakibatkan laut yang seharusnya menjadi potensi secara ekonomi, politik dan pertahanan tetapi saat ini malah menjadi ancaman secara ekonomi, politik dan pertahanan bagi bangsa Indonesia. Bentuk-bentuk ancaman yang seringkali terjadi antara lain adalah pelanggaran teritorial oleh kapal asing, kerusakan di berbagai daerah, penyelundupan di berbagai wilayah perbatasan, gerakan separatistis, dan lain sebagainya. Kesemua ancaman tersebut memiliki keterkaitan dengan dimensi ruang laut.

Ketidakmampuan bangsa Indonesia menghindari dan mengatasi ancaman tersebut adalah karena ketidakmampuan bangsa Indonesia untuk mewujudkan wawasan nusantara sebagai

kekuatan dan kesatuan bangsa. Hal ini akibat lemahnya kebijakan pembangunan di bidang kelautan di masa lalu.

Dari pengalaman masa lalu tersebut maka pada masa kini dan yang akan datang perlu dibangun sebuah visi baru dalam pembangunan ekonomi Indonesia yakni visi ekonomi kelautan. Visi ini mengedepankan pembangunan ekonomi yang mendayagunakan sumberdaya kelautan (*ocean based resource*) secara bijaksana sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan didukung oleh pilar-pilar ekonomi sumberdaya daratan (*land based resource*) yang tangguh dan mampu bersaing dalam kancah kompetisi global antar-bangsa.

Namun demikian untuk mewujudkan kembali cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu menjadi bangsa dan negara bahari yang tangguh secara ekonomi, politik dan pertahanan, maka hal tersebut sangat tergantung pada keputusan ekonomi dan politik baik dari eksekutif maupun legislatif dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan kelautan nasional. Sebab peran serta tanggungjawab eksekutif, legislatif ini sangat menentukan arah dan kapasitas pembangunan kelautan.

Dengan melakukan pembenahan struktur pemerintahan yaitu dari DKP menjadi Depkan dan Menko Kelautan, maka harapannya pembangunan kelautan di masa datang akan mampu mengembalikan kejayaan bangsa Indonesia di bidang kelautan.

Penulis adalah Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.